



BAPPENAS

Kaji Ulang Satu Dekade Pengaruhutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia

Ringkasan Eksekutif



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

Kaji Ulang Satu Dekade Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Diterbitkan oleh:

© 2013 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

ISBN: 978-979-3764-94-8



BAPPENAS

Tim Pengendali Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan ACDP:

- Ketua Bersama/Direktur : Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Ketua Bersama : Dra. Nina Sardjunani, MA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS
- Ketua Bersama : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
- Wakil Ketua : Ir. Hendarman, M.Sc, Ph.D.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Pengelola Program : Dr. Bambang Indriyanto
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mitra Pembangunan Internasional : Uni Eropa
Australian Agency for International Development (AusAID)
Bank Pembangunan Asia (ADB)
- Sekretariat ACDP : Alan Prouty; John Virtue; David Harding; Abdul Malik; Basilius Bengoteku;
Lestari Boediono; Daniella Situmorang

**Kaji Ulang Satu Dekade
Pengarutamaan Gender
Bidang Pendidikan di Indonesia**

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui *Australian Aid*, Uni Eropa (UE), dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) telah membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (*Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP*). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (*Education Sector Support Program/ESSP*). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan Uni Eropa melalui ACDP.



Institusi-institusi yang bertanggung jawab melaksanakan studi ini adalah PT TRANS INTRA ASIA bekerjasama dengan Institute of Public Administration of Canada (IPAC).

Anggota tim studi yang menyiapkan laporan ini adalah:

1. Michelle Moffatt, Ketua Tim/*Research Specialist*
2. Yusuf Supiandi, *Gender Specialist*
3. Abdul Rahman, *Education Specialist*
4. Bambang Juanda, *Data Analyst*

Pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulisnya dan tidak serta merta mewakili pandangan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Australia, Uni Eropa atau Bank Pembangunan Asia.

Daftar Singkatan

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM	:	Angka Partisipasi Murni
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
CEDAW	:	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EDS	:	Evaluasi Diri Sekolah
EFA	:	<i>Education For All</i> (Pendidikan untuk Semua)
GBS	:	<i>Gender Budget Statement</i> (Pernyataan Anggaran Gender)
GRB	:	<i>Gender Responsive Budget</i> (Anggaran Tanggap Gender)
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
Inpres	:	Instruksi Presiden
IPG	:	Indeks Paritas Gender
Kemdikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	:	Kementerian Agama
KPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Madrasah Alliyah
MDGs	:	<i>Millennium Development Goals</i>
MGMP	:	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	:	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
PAKEM	:	Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	:	<i>Performance Based Budgeting</i> (Anggaran Berbasis Kinerja)
PIRLS	:	<i>Progress in International Reading Literacy Study</i> (Penelitian Kemajuan Membaca dan Menulis Internasional)
PISA	:	<i>Programme for International Student Assessment</i> (Program Penilaian Murid Internasional)
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Pokja	:	Kelompok Kerja
PSW/G	:	Pusat Studi Wanita/Gender
QEM	:	<i>Quality of Education in Madrasah (Study)</i> (Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah)
Renstra	:	Rencana Strategis
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPS	:	Rencana Pengembangan Sekolah
SD	:	Sekolah Dasar
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
STAIN	:	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TIMMS	:	<i>Trends in International Mathematics and Science Study</i> (Penelitian dalam Tren Matematika dan Sains Internasional)
UIN	:	Universitas Islam Negeri

Prakata

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah meraih banyak kemajuan dalam mempromosikan dan meningkatkan kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender dalam peraturan, kebijakan, berbagai strategi, dan program-program. Dalam sektor pendidikan, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya mengurangi kesenjangan gender termasuk dalam angka partisipasi. Indonesia saat ini berada dalam jalur pencapaian *Millennium Development Goals* untuk pendidikan dasar universal dan paritas gender. Paritas gender telah terpenuhi hampir di semua jenjang pendidikan. Selain itu, paritas gender telah dicapai dalam program keaksaraan bagi penduduk berumur 15-24 tahun. Kami percaya bahwa telah terbangun dasar yang kuat untuk pemenuhan akses belajar dan kami akan terus berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil kesetaraan gender yang telah diraih selama ini. Kami juga akan terus berusaha untuk mengurangi dan memecahkan masalah ketidaksetaraan, misalnya angka partisipasi yang rendah untuk perempuan di beberapa daerah Indonesia Timur dan angka putus sekolah untuk laki-laki di tingkat sekolah menengah atas yang hingga saat ini belum mengalami perbaikan.

Walaupun Penelitian telah mencatat hal-hal kunci yang disebutkan di atas, kami pun percaya bahwa selain akses, masih ada hal-hal lain yang tak kalah penting. Pencapaian paritas gender merupakan langkah awal yang sangat penting. Namun demikian, adanya akses yang setara tidak menjamin adanya kesetaraan gender itu sendiri. Mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan memerlukan kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun perempuan di mana mereka diperlakukan secara sama dan adil. Hal ini juga akan mempengaruhi berbagai kinerja seperti misalnya dalam hasil-hasil pembelajaran yang juga diraih dalam konteks kesetaraan. Lebih jauh lagi, anak-anak Indonesia diharapkan akan mendapatkan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesempatan setara dalam pasar tenaga kerja dan bagian kehidupan lainnya.

Penelitian ini melihat lebih jauh dimensi kunci yang ada dalam proses belajar dan mengajar termasuk kurikulum, buku teks, bahan ajar, lingkungan sekitar, pengembangan kapasitas guru, dan pencapaian hasil oleh murid. Salah satu berita menggembirakan yang didapat dari Penelitian ini adalah telah banyaknya praktik-praktik yang baik dan inovatif. Misalnya, inisiatif untuk menghilangkan stereotip gender dan bias dalam bahan ajar dan lingkungan sekolah, integrasi kesadaran gender dalam pelatihan kepala sekolah dan guru, dan sensitifitas gender untuk seluruh komunitas sekolah. Penelitian juga menyertakan beberapa contoh praktik yang baik serta inovasi yang menjanjikan. Namun demikian, masih ada kesempatan-kesempatan di lapangan yang belum dikembangkan secara maksimal karena praktik yang baik ini terjadi hanya di daerah tertentu saja dan dilakukan dalam skala kecil, biasanya melalui kegiatan uji coba dengan kesempatan replikasi yang terbatas.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengevaluasi dan mendiseminasi praktik-praktik yang baik yang telah ada selama ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan prioritas dalam penggunaan sumber daya dan pendanaan untuk mereplikasi inisiatif yang berpotensi memiliki dampak yang baik. Untuk bisa melakukan hal itu, kita harus melihat kembali visi awal dalam kesetaraan gender dalam pendidikan dan kapasitas kita dalam memimpin dan mengelola hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun telah ada dukungan di tingkat pusat, saat ini masih belum ada arahan dan strategi yang jelas untuk pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan. Selain itu, kita juga dihadapkan pada kapasitas teknis yang terbatas. Kita tidak dapat berasumsi bahwa kesadaran gender dan upaya peningkatan kapasitas yang telah dilakukan selama lima hingga sepuluh tahun lalu sudah

cukup. Jika kita ingin melangkah ke depan dan mencapai kesetaraan gender, kita harus memperbaharui upaya-upaya dalam pengarusutamaan kesadaran gender dalam kebijakan pendidikan kunci dan lembaga perencanaan. Dan kita juga perlu terus menjaga momentum dalam upaya pembaharuan keterampilan dan pengetahuan kita kepada kaum muda.

Harapan kami, berbagai informasi dan rekomendasi dalam Penelitian ini dapat membantu kita semua dalam merevitalisasi upaya-upaya yang ada. Kami juga berharap kita dapat terus bersama-sama melangkah maju dalam mencapai kesadaran dan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Jakarta, Juni 2013

Deputi Menteri PPN/Bappenas
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan



Dra. Nina Sardjunani, MA

Ringkasan Eksekutif

Pengantar

Tinjauan Satu Dasawarsa Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang dalam bidang sosial dan ekonomi. Sumbangan tersebut berbentuk dukungan dalam penyusunan strategi untuk memperluas penerapan praktik-praktik baik yang sudah ada serta pengembangan kebijakan, strategi dan program baru dalam pencapaian kesetaraan gender.

Tinjauan ini merangkum kebijakan terkait dan konteks yang strategis untuk pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan dalam sepuluh tahun terakhir. Tinjauan ini juga menyertakan analisis struktur tata kelola serta peran dan tanggung jawab untuk pengarusutamaan gender dalam sektor pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen ini juga mencakup program terkait yang telah dilaksanakan dalam sepuluh tahun terakhir (termasuk program spesifik gender dan netral gender) dengan fokus pada program yang sedang dilaksanakan saat ini. Tinjauan ini juga mencakup analisis tren partisipasi dan indikator pencapaian yang terkait kesetaraan gender dalam akses pendidikan.

Pemerintah mengakui bahwa adanya akses dalam pendidikan saja tidak menjamin keberhasilan pendidikan. Meningkatkan paritas dalam tingkat partisipasi hanya merupakan langkah pertama untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan karena paritas dalam partisipasi hanya “mengobati gejala”, bukan “menyembuhkan akar” ketidaksetaraan. Oleh sebab itu, Tinjauan ini tidak hanya mengkaji kesempatan belajar melainkan memperluas kajian untuk mencakup dimensi mutu pendidikan yang berdampak terhadap kesetaraan, yaitu mengkaji beberapa aspek pendidikan dari sudut pandang gender antara lain proses belajar mengajar, isi kurikulum dan bahan ajar lainnya, pelatihan dan pengembangan kapasitas guru, keberhasilan murid, hubungan guru murid, serta keamanan lingkungan belajar.

Berbagai topik yang ada dalam Tinjauan ini merupakan penemuan penelitian di lima Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kupang, dan Gorontalo. Topik-topik tersebut juga berasal dari penelitian lain yang dilakukan di Indonesia dan daerah lain. Studi kasus yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan telah memberikan kontribusi terhadap pembelajaran secara umum.

Lingkungan yang Kondusif

Indonesia telah mengesahkan perjanjian pokok internasional yang mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan. Indonesia juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dalam Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All* atau EFA) tahun 2000, *Beijing Platform for Action* tahun 1995 serta Deklarasi Milenium PBB tahun 2000. Pada tahun 1990 Indonesia mengesahkan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi

terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW) disahkan oleh Undang-undang 7/1984 dan Protokol Tambahan Tidak Wajib terhadap CEDAW ditandatangani pada tahun 2000.

Salah satu dari enam tujuan Pendidikan untuk Semua yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2015 adalah penghapusan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015. Tujuan tersebut menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dalam segala hal serta menjamin keunggulan hasil bagi semua murid. Pencapaian mutu oleh semua murid tersebut dilihat dari keberhasilan dalam mencapai ukuran yang disepakati bersama dan bisa diukur. Ukuran tersebut menitikberatkan pada kemampuan membaca, menghitung dan keterampilan hidup yang mendasar. *Millenium Development Goals* (MDG) juga menegaskan kembali bahwa pencapaian pendidikan dasar untuk semua serta kesetaraan gender pada pendidikan dasar maupun menengah akan dicapai pada tahun 2015.



MDG menjadi rujukan penting dalam persiapan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah telah mengarusutamakan MDG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Pemerintah telah menyatakan komitmennya dalam menghapus kesenjangan gender dalam semua sektor strategis termasuk pendidikan. Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta petunjuk teknisnya telah dikeluarkan agar kesetaraan gender disertakan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari setiap kebijakan dan program nasional. Pada tahun 2002, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan Inpres 9/2000. Permendiknas 84/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di tingkat pusat maupun daerah.

RPJMN 2010-2014 menetapkan 11 prioritas termasuk pendidikan dan tiga prinsip lintas sektor sebagai dasar operasional pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Ketiga prinsip lintas sektoral yaitu 1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; 2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan 3) pengarusutamaan gender. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan 2010-2014 sebagai penjabaran RPJMN dan sebagai pedoman reformasi. Renstra Pendidikan tersebut tetap mempertahankan prioritas pemerintah pada pendidikan dasar dan penyediaan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu bagi semua anak laki-laki dan perempuan.

Sebagai bagian reformasi tata kelola anggaran pada tahun 2009 Bappenas mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Pembentukan Panitia Pengarah dan Tim Teknis untuk Anggaran Tanggap Gender dan Tanggap Kemiskinan (*Gender-Responsive Pro-Poor Budgeting*). Tim tersebut terdiri dari pejabat Eselon 1 dan 2 dari enam Kementerian termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2009 Kemdikbud dan enam Kementerian lainnya dipilih untuk uji coba pengembangan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement/GBS*) serta melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting/PBB*) dari tahun 2010. Pada tahun 2009, beberapa wakil Kementerian telah dilatih dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender yang terkait dengan Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Tanggap Gender (*Gender Responsive Budgeting/GRB*).¹

Pada tingkat pemerintah daerah, Anggaran Tanggap Gender telah diperkenalkan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan komitmen kebijakan nasional untuk kesetaraan gender dalam pendidikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 mewajibkan semua instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan analisis gender dalam proses penyusunan anggaran. Telah banyak kegiatan sosialisasi gender dan pelatihan tentang konsep dan mekanisme analisis gender maupun penganggaran tanggap gender. Pelatihan tersebut juga membahas cara menyertakan kepentingan kesetaraan gender ke dalam pengembangan kebijakan dan program. Beberapa pemerintah kabupaten/kota yang didukung oleh lembaga donor atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah berhasil melaksanakan pelatihan pengembangan Anggaran Tanggap Gender. Namun demikian, penggunaan Anggaran Tanggap Gender dengan hasil yang jelas, khususnya untuk sektor pendidikan masih merupakan tantangan untuk provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Rekomendasi

Mengembangkan peraturan berikut:

- Peraturan Kemdikbud dan Kemenag yang mewajibkan semua Direktorat Jenderal untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan semua pemerintah daerah dan DPRD untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama yang mewajibkan semua Kantor Wilayah dan Kantor Kemenag Kab/Kota untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan di semua jenjang pendidikan.

1 UNDP. 2009. *Assessing Gender Responsive Local Capacity Development in Indonesia*. UNDP Bangkok.

Melembagakan Pengarusutamaan Gender

Struktur yang diperlukan dalam pengarusutamaan gender telah dimiliki oleh Kemdikbud dan Kemenag. Dalam sepuluh tahun terakhir, Kemdikbud dan Kemenag telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengertian terkait kesetaraan gender. Wakil sektor pendidikan yang diwawancarai untuk Tinjauan ini menunjukkan bahwa mereka mengerti dan tertarik dalam mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan. Pemangku kepentingan dalam Tinjauan ini juga menyebutkan bahwa sepuluh tahun yang lalu kesetaraan gender masih merupakan hal yang tidak diketahui dan dimengerti sama sekali. Namun demikian, kini mereka sudah memiliki pengertian mengenai pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan

Para pemimpin Kemdikbud mendukung kesetaraan gender dalam sektor pendidikan. Dukungan tersebut tercermin dalam adanya anggaran untuk kegiatan kesetaraan gender serta program inovatif yang sedang diujicobakan di sekolah formal maupun non formal. Namun demikian masih belum ada arah/haluan strategis yang jelas untuk pengarusutamaan gender dalam pendidikan formal. Pada tahun 2012 Sekretariat Pengarusutamaan Gender telah menjadi bagian Biro Perencanaan Kemdikbud. Hal ini merupakan perkembangan yang positif dalam mendukung pengarusutamaan gender pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

Para pemimpin Kemenag mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dan beberapa Direktur Jenderal mengusulkan agar Sekretariat Pengarusutamaan Gender yang sekarang berada di bawah Biro Perencanaan diaktifkan kembali. Namun demikian, perlu dipertimbangkan besarnya tantangan yang dihadapi Kemenag dalam pengarusutamaan gender selama sepuluh tahun terakhir. Sebagai gambaran, istilah "pengarusutamaan gender" sendiri dapat menimbulkan tanggapan negatif dari beberapa kalangan Agama. Salah satu Direktur Jenderal berkeyakinan bahwa penyusunan strategi "Kesetaraan dalam Pendidikan" yang menitikberatkan pada kaitan antara mutu dan kesetaraan dalam pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan. Pendekatan tersebut dapat membahas belum adanya arah/haluan strategis yang jelas untuk menuju pengarusutamaan gender dalam sekolah Islam/madrasah dan juga untuk sekolah berbasis agama lainnya.

Keterlibatan ahli gender dari Kemdikbud dan Kemenag dalam pengelolaan program sangat penting bagi pelaksanaan kesetaraan gender dalam pendidikan. Namun demikian, saat ini ke dua Kementerian mengalami keterbatasan dalam hal ini karena banyak perintis perjuangan kesetaraan gender yang telah memasuki masa pensiun sementara proses regenerasi belum membuahkan hasil. Salah satu langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan ini adalah dengan menghadirkan ahli gender laki-laki dan perempuan sebagai anggota tim dan menghasilkan kegiatan pengembangan kapasitas yang tanggap gender terutama di lingkungan di mana kecenderungan menolak kesetaraan gender masih kuat. Selama dasawarsa terakhir, KPPPA, Kemdikbud maupun Kemenag telah merasakan manfaat keberadaan pria maupun wanita pejuang kesetaraan gender dimana mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki contoh-contoh praktik yang baik dalam pelebagaan pengarusutamaan gender.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya *database* yang terpilah menurut jenis kelamin yang dapat mendukung perencanaan dan penganggaran tanggap gender untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi dan indikator kinerja dalam pendidikan. Di antara semua sekolah di lima Kabupaten dan Kota yang dikunjungi selama Tinjauan ini, tidak ada yang menyusun data yang dipilah menurut jenis kelamin sebagai laporan kinerja kepada Dinas Pendidikan. Kabupaten dan Kota tersebut menyatakan bahwa mereka belum diminta mengumpulkan data yang dipilah menurut jenis kelamin dan mereka belum mempunyai instrumen pengumpulan data tersebut. Di tingkat sekolah, diperlukan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin agar Manajemen Berbasis Sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Kabupaten dan Kota perlu mengumpulkan dan menganalisis data yang dipilah menurut jenis kelamin dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang tanggap gender.

Rekomendasi

1. Pengembangan strategi dan rencana kerja di Kemdikbud dan Kemenag yang juga menyertakan upaya pencapaian kesetaraan gender pada semua lembaga pendidikan (tidak hanya menitikberatkan pada kesempatan memperoleh pendidikan/akses melainkan kesetaraan kesempatan dalam proses belajar mengajar, prestasi belajar dan keberhasilan pendidikan). Strategi dan rencana kerja tersebut bukan mengukur hasil kegiatan (output) namun mengukur keberhasilan (outcome) upaya yang telah dilakukan. Informasi-informasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk Renstra. Selain itu, strategi dan rencana kerja harus menyertakan hal berikut:
 - Merumuskan Anggaran Tanggap Gender dan Pernyataan Anggaran Gender.
 - Mendukung setiap Direktorat Jenderal dalam mengembangkan dan mengintegrasikan rencana kerja dan anggarannya untuk mencapai sasaran strategis dalam kesetaraan gender.
 - Mendukung pemerintah daerah dalam melakukan hal yang sama
 - Menjamin rencana strategis tersebut tidak hanya menyangkut kesetaraan kesempatan (akses) namun juga terkait kesetaraan dalam proses belajar mengajar dan hasil dan prestasi belajar.
2. Sekretariat Pengarusutamaan Gender di bawah Biro Perencanaan Kemdikbud maupun Kemenag agar dikelola oleh staf yang terlatih (Eselon 3 atau 4).
3. Memberikan prioritas untuk peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dalam pendidikan bagi para pimpinan Kemdikbud dan Kemenag.
4. Peningkatan kapasitas bagi Pokja Gender di daerah. Memberikan pengarahannya yang jelas untuk Pokja terkait hal-hal strategis dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agar Pokja tersebut dapat mempertahankan peningkatan mutu sekolah yang tanggap gender secara konsisten.
5. Kemdikbud mengadakan evaluasi resmi terhadap model uji coba kesetaraan gender dalam pendidikan yang dikembangkan di Kabupaten Sleman, Klaten serta Kabupaten/Kota lain. Informasi seperti proses dan bahan yang digunakan dalam uji coba dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyebarluaskan model tersebut. Kemenag mulai melakukan uji coba model kesetaraan gender di madrasah yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang sama dengan Kabupaten/Kota dimana uji coba dilaksanakan oleh Kemdikbud. Uji coba model dilaksanakan melalui Pokja Gender yang dibentuk oleh Kemenag bekerjasama dengan lembaga setempat seperti Universitas Islam Negeri (UIN,) Institut Agama Islam Negeri (IAIN,) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN,) dan Pusat Studi Wanita/Gender.
6. Mendukung Pusat Studi Wanita/Gender di perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan terkait kesetaraan gender dalam pendidikan formal.
7. Kemdikbud dan Kemenag mengembangkan standar nasional kesetaraan gender untuk lembaga pendidikan. Definisi sekolah tanggap gender menjadi bagian pedoman pelaksanaan untuk sekolah dan digunakan dalam Rencana Pengembangan Sekolah.

Kesetaraan Akses

Indonesia telah meraih berbagai kemajuan dalam sektor pendidikan selama sepuluh tahun terakhir dan diperkirakan akan mencapai *Millennium Development Goals (MDG)* 2 dan 3 (Angka Partisipasi pendidikan dasar 100% dan paritas gender). Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan dasar (kelas 1 - 6) telah mencapai 94.7% dengan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.² Pemerintah sadar bahwa sasaran nasional Pendidikan untuk Semua yaitu wajib belajar 9 tahun bagi semua anak laki-laki maupun perempuan belum tercapai karena Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan menengah pertama (kelas 7 - 9) baru mencapai 67.6%.³

Keberhasilan ini merupakan gabungan dari adanya kebijakan yang efektif dan investasi nasional yang berkelanjutan dalam sektor pendidikan. Dengan adanya dua hal tersebut, kini telah tersedia lebih banyak sekolah di daerah pedesaan. Selain itu, biaya sekolah yang bersifat langsung maupun tidak langsung menjadi semakin ringan. Namun hal-hal lain seperti mutu dan relevansi pendidikan juga merupakan pertimbangan yang mempengaruhi keputusan tentang lamanya anak disekolahkan. Pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi hal-hal ini.

2 RPJMN Hal. I-51 (Prioritas 2: Pendidikan)

3 Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, Rencana Strategis Pendidikan (Renstra) 2010-2014

Adanya program subsidi pendidikan yang netral gender⁴ dari Pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Keluarga Harapan, serta pembangunan sekolah baru dan perluasan sekolah yang sudah ada (Satu Atap), telah membantu pencapaian tujuan kesempatan belajar (akses) untuk semua. Setelah program subsidi dan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dilaksanakan selama sepuluh tahun, beberapa keberhasilan yang penting dalam akses dalam pendidikan pada tingkat nasional telah dicapai, antara lain:

- Angka Partisipasi Murni laki-laki maupun perempuan sudah meningkat
- Paritas gender dalam angka partisipasi dan keaksaraan sudah tercapai untuk kelompok umur 15 – 24 tahun
- Angka Melanjutkan laki-laki dan perempuan telah meningkat, terutama dari pendidikan menengah pertama ke menengah atas
- Angka Putus Sekolah menurun bagi laki-laki dan perempuan di pendidikan menengah pertama dan menengah atas
- Rata-rata Lama Sekolah murid laki-laki maupun perempuan naik
- Biaya langsung pendidikan turun dan jumlah sekolah di daerah pedesaan meningkat
- Lebih dari 7,7 juta anak laki-laki dan perempuan dari keluarga miskin menerima beasiswa dan jumlah ini merupakan peningkatan sejak 2012
- Sekitar 778.000 rumah tangga miskin telah menerima subsidi yang memungkinkan mereka menyekolahkan anaknya
- Pelaksanaan program BOS sejak tahun 2005 berkorelasi dengan peningkatan Angka Melanjutkan bagi laki-laki maupun perempuan
- Penambahan SMP sebanyak 4.700 sekolah telah direncanakan untuk tahun 2014. 3.500 SD akan digabungkan dengan SMP (Satu Atap) sedangkan 1.200 SMP baru yang berdiri sendiri juga akan dibangun. Pembangunan sekolah tersebut demi memenuhi tuntutan peningkatan kesempatan bersekolah (akses)
- Perkawinan usia dini sudah mulai berangsur-angsur turun pada tingkat nasional
- Jumlah mahasiswa perempuan naik secara signifikan selama satu dasawarsa terakhir
- Rasio kepala sekolah dasar perempuan telah naik di sejumlah provinsi

Namun masih ada perbedaan antar provinsi yang perlu ditangani. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 menunjukkan bahwa angka nasional tidak menggambarkan kondisi di tingkat provinsi, terutama untuk pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Di beberapa provinsi, Indeks Paritas Gender untuk Angka Partisipasi Murni menunjukkan bahwa jauh lebih banyak murid perempuan daripada murid laki-laki di SMP/MTs maupun SMA/MA. Di seluruh Indonesia, murid laki-laki dari keluarga kurang mampu putus sekolah karena kemiskinan dan tekanan dari keluarga agar mereka membantu mencari nafkah. Perkawinan dini yang disetujui oleh kepala keluarga laki-laki menjadi penyebab putus sekolah untuk murid perempuan miskin, terutama di daerah pedesaan. Angka Melanjutkan masih perlu ditingkatkan karena pada beberapa provinsi terdapat Angka Melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/MA yang sangat rendah baik untuk laki-laki dan terutama perempuan.

Para pengawas dan kepala sekolah kurang mengerti pentingnya pengumpulan dan analisis data kinerja yang dipilah menurut jenis kelamin (misalnya Angka Putus Sekolah, kehadiran murid, Angka Mengulang, dan kinerja belajar) untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif. Keberadaan data dan analisis tersebut memungkinkan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan strategi, serta pemantauan terhadap upaya penghapusan kesenjangan (*gap*) gender dalam keikutsertaan maupun prestasi belajar murid di tingkat sekolah. Rencana Pengembangan Sekolah (*School Improvement Plans*) serta Evaluasi Diri Sekolah yang baru tidak mewajibkan pengumpulan dan analisis data yang dipilah menurut jenis kelamin agar kesenjangan gender dalam keikutsertaan dan prestasi belajar di tingkat sekolah dapat ditemukan dan ditanggapi.

4 Yang dimaksud dengan pendekatan netral gender termasuk program dan kegiatan di mana gender tidak berpengaruh terhadap keberhasilan. Proses dan hasil juga tidak boleh mempertahankan ketidak-setaraan gender yang sudah berada di dalam lingkungan yang bersangkutan.

Rekomendasi

1. Memastikan data yang dipilah menurut jenis kelamin dari semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dikumpulkan secara sistematis dan mencakup indikator partisipasi serta kinerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin instrumen untuk pengumpulan data di tingkat sekolah memungkinkan kabupaten/kota dengan mudah merekam dan menganalisis data yang dipilah menurut jenis kelamin. Menyertakan hal tersebut dalam pelatihan pengembangan profesi untuk kepala sekolah dan pengawas, Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan Pemantauan Sekolah oleh Kabupaten/Kota.
2. Memberi prioritas dalam peningkatan kinerja bagi kabupaten/kota dan sekolah yang kinerjanya rendah. Pemerintah daerah agar:
 - Mengembangkan sistem untuk menemukan sekolah yang berisiko tinggi dan murid laki-laki maupun perempuan yang memiliki risiko tersebut
 - Mendukung sekolah untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan untuk pengembangan sekolah termasuk kesetaraan gender. Menciptakan sistem insentif untuk mendukung peningkatan kinerja murid sebagaimana diukur dalam penurunan Angka Putus Sekolah dan keberhasilan pelajaran bagi murid laki-laki dan perempuan.
 - Melakukan pemetaan sekolah dengan menggunakan model Pemetaan Sekolah Partisipatif yang telah berhasil di Gorontalo untuk pencapaian SPM di semua sekolah.
3. Memantau Program Beasiswa Miskin untuk memastikan bahwa subsidi tersebut diterima langsung oleh penerima yang berhak – baik murid perempuan maupun laki-laki yang tidak mampu. Pemantauan tersebut memerlukan pengumpulan sistematis data yang dipilah menurut jenis kelamin. Juga perlu untuk mempertimbangkan perluasan beasiswa untuk menambah jumlah laki-laki dan perempuan miskin yang melanjutkan ke pendidikan menengah pertama dan menengah atas.
4. Melaksanakan pelaporan kemajuan tahunan bagi kabupaten/kota berdasarkan indikator Pendidikan Untuk Semua dengan menggunakan statistik tingkat sekolah yang dipilah menurut jenis kelamin. Laporan ini akan memberikan gambaran singkat dari situasi yang terjadi di sekolah serta mengungkapkan unsur penting untuk memahami arah pengembangan sistem pendidikan kabupaten/kota.
5. Bekerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan LSM untuk penelitian tentang 1) anak remaja yang menikah dini dan 2) murid perempuan yang hamil di luar pernikahan, terutama murid kelas 12, untuk lebih memahami gejala putus sekolah pada kelompok tersebut serta keputusan kepala sekolah untuk membantu atau tidak membantu murid tersebut menyelesaikan pendidikan formalnya. Mempertimbangkan kebijakan dan pedoman bagi sekolah untuk menjamin murid perempuan tersebut bisa mengikuti ujian akhir sekolah.
6. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami penyebab:
 - Angka Mengulang untuk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan untuk semua jenjang pendidikan di sebagian besar provinsi.
 - Putus sekolah murid laki-laki dan perempuan. Kabupaten/kota mengadopsi strategi praktik yang baik (*good practice*) agar langkah pengaman dapat dilakukan untuk mengurangi Angka Putus Sekolah dan membantu murid yang telah putus sekolah untuk kembali.
 - Analisis kesenjangan Indeks Paritas Gender (IPG) dalam Angka Partisipasi Murni (APM) antara kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dan kabupaten dengan IPG dalam APM yang lebih rendah atau lebih tinggi dari rata-rata perlu melakukan analisis untuk menjelaskan kesenjangan tersebut terutama untuk pendidikan menengah pertama dan menengah atas.
7. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar menindak lanjuti rendahnya jumlah kepala sekolah perempuan yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah menengah pertama dan terutama menengah atas.
8. Perguruan tinggi agar menindak lanjuti rendahnya jumlah dosen perempuan yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai tenaga pengajar di institusi masing-masing.



Kesetaraan Kesempatan dalam Pendidikan

Pengarusutamaan gender telah diterima di seluruh dunia sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Pengarusutamaan bukanlah tujuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran serta pertanggungjawaban bagi semua tenaga kependidikan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan.

Pendekatan Spesifik Gender

Selama satu dasawarsa terakhir, cukup banyak kegiatan peningkatan kapasitas dalam sosialisasi konsep kesetaraan gender dan peraturan/perundangan terkait telah dilakukan oleh Kemdikbud di seluruh Indonesia. Pengarusutamaan gender di Kemdikbud dimulai pada tahun 2003 dengan adanya anggaran pusat untuk melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender. Keberhasilan yang dilaporkan oleh pihak terkait dalam Tinjauan ini antara lain:

- Pedoman pelaksanaan, penelitian dan kertas kerja kebijakan, modul serta alat pelatihan telah dikembangkan dan disebarluaskan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil tersebut dicapai melalui kemitraan antara pemerintah, LSM, Pusat Kajian Gender di berbagai perguruan tinggi serta – baru-baru ini – melalui Kelompok Kerja (Pokja) Gender di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/kota.
- Peningkatan kesempatan bersekolah untuk semua anak, termasuk perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang melanjutkan ke perguruan tinggi merupakan jumlah yang paling tinggi selama ini.
- Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan sektor pendidikan tentang masalah-masalah kesetaraan gender dalam pendidikan
- Kebanyakan kabupaten/kota yang dikunjungi melaporkan bahwa sudah lebih banyak perempuan yang menjadi pengawas dan kepala sekolah jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Di tingkat pusat dilaporkan bahwa lebih banyak perempuan yang menjadi pegawai negeri sipil.

- Sudah ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi contoh pengarusutamaan gender dengan program uji coba yang inovatif untuk pendidikan formal maupun nonformal (sekolah tanggap gender). Program tersebut dibiayai oleh *block grant* dari anggaran pusat, provinsi dan – pada beberapa tempat – anggaran kabupaten/kota.
- Pengembangan dan pelaksanaan modul pelatihan pendidikan tanggap gender untuk kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling di sekolah uji coba.
- Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang tanggap gender untuk semua mata pelajaran di semua tingkat sekolah yang ikut program uji coba.
- Sosialisasi kesetaraan gender bagi masyarakat dan keluarga melalui media serta program non formal dan informal.
- Semakin banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan perencanaan dan anggaran tanggap gender.

Selama beberapa tahun terakhir ini, Sekretariat Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal telah merancang dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba inovatif dalam pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kesetaraan gender dalam pendidikan. Kegiatannya mencakup upaya mendukung kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di sekolah formal di semua jenjang (termasuk madrasah) dan pendidikan non formal (PKBM). Penelitian untuk Tinjauan ini menemukan adanya perubahan positif di kabupaten/kota di mana uji coba tersebut dilaksanakan. Dampak kegiatan di tingkat sekolah belum dievaluasi secara keseluruhan di tingkat pusat namun Tinjauan ini menemukan adanya contoh praktik yang baik (*good practice*) yang bisa diterapkan.

Pendekatan Belajar Mengajar Tanggap Gender

Kesetaraan dalam kesempatan belajar tercapai apabila semua anak perempuan dan laki-laki menerima perlakuan dan perhatian yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam proses belajar mengajar. Mereka menerima kurikulum yang sama walaupun gaya mengajar bisa berbeda untuk mengakomodasi gaya belajar (*learning style*) yang berbeda. Kesetaraan proses belajar mengajar juga menuntut agar semua murid menerima metode pengajaran serta bahan ajar yang bebas stereotip dan bias gender. Mereka harus memiliki kebebasan dalam belajar, bereksplorasi, dan mengembangkan keterampilan terkait semua mata pelajaran/bidang ilmu serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam lingkungan yang aman.

Guru PAUD yang telah dilatih tanggap gender menyadari bahwa anak cenderung memilih kegiatan yang paling cocok dengan kemampuan mereka. Umpamanya murid laki-laki lebih memilih bermain “bangun-bangunan” dengan balok kayu atau batu sedangkan anak perempuan lebih memilih menggunting dan menempel kertas atau mewarnai. Menjadi kewajiban guru untuk menjamin bahwa semua anak mengikuti semua kegiatan untuk meningkatkan keterampilannya. Pada saat anak lahir, pihak keluarga cenderung untuk langsung membiasakan anak perempuan maupun laki-laki untuk mengikuti peran dan perilaku yang berbeda menurut norma dan nilai setempat. Guru yang pernah mengikuti pelatihan kesetaraan gender mengetahui cara melakukan analisis gender secara berkala. Analisis tersebut memungkinkan mereka untuk menyadari bias gender dalam masyarakat agar bias gender secara aktif dapat dihindari dalam ruang kelas.

Di kelas, cara belajar murid laki-laki bisa sangat berbeda dengan cara belajar anak perempuan. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat keikutsertaan mereka dalam kegiatan kelas, prestasi belajar dan hasil pembelajaran. Nilai dan stereotip tentang gender dari masyarakat dan budaya setempat bisa secara tidak sadar terbawa di ruang kelas maupun sekolah melalui hubungan guru-murid dan antara murid. Pendekatan dan metode mengajar serta menilai prestasi belajar bisa juga memihak pada laki-laki. Di Indonesia sering kali perempuan diarahkan untuk tidak bicara di depan umum, tidak mengeluarkan pendapat, dan tidak mempersoalkan wewenang laki-laki.

Proses pendidikan bisa memperkuat ketidaksetaraan gender melalui pembagian tugas di kelas seperti menugaskan murid perempuan untuk melakukan kegiatan yang dianggap berstatus rendah seperti menyapu dan membersihkan ruang kelas sedangkan laki-laki ditugaskan melakukan kegiatan yang dianggap memiliki status tinggi seperti mengatur waktu (*time keeping*). Murid laki-laki juga cenderung dipilih untuk memimpin kelas. Hal ini menunjukkan guru secara tidak sengaja mendukung bias gender. Selain itu, murid perempuan tidak didorong, bahkan dilarang, untuk mengikuti kegiatan olah raga ekstra

kurikuler yang dianggap sebagai olah raga laki-laki seperti sepakbola dan bola basket. Sedangkan murid laki-laki tidak didorong untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang dianggap sebagai kegiatan perempuan seperti memasak atau menjahit. Walaupun tidak semua sekolah memperkuat ketidaksetaraan gender, hal-hal seperti ini ditemui di banyak sekolah yang dikunjungi.

Di Indonesia pelatihan guru untuk memperlakukan murid laki-laki dan perempuan secara setara melalui pembagian tugas dan partisipasi dalam semua kegiatan sekolah seringkali tidak dilakukan. Harapan bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan membawa perubahan dari dalam untuk kesetaraan gender tidak dapat dicapai jika kapasitas guru tidak dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya yang terintegrasi oleh lembaga pendidikan guru, lembaga pelatihan guru, dan didukung oleh upaya pengembangan kapasitas yang terus dilakukan. Pengawas dan kepala sekolah juga perlu dilatih dalam mendukung adanya lingkungan belajar yang ramah anak dan tanggap gender dan juga mendorong ketaatan terhadap kode etik sekolah.

Sekolah membutuhkan kode etik yang secara jelas melarang diskriminasi tenaga kependidikan dan murid agar sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman dan dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Dukungan terhadap kesetaraan gender di sekolah dan sosialisasi mengenai dampak buruk perilaku anti-sosial seperti *bullying* dan pelecehan seksual adalah aspek penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. *Bullying* dan intimidasi antara murid dilaporkan sebagai hal yang sering terjadi di beberapa sekolah menengah, terutama antara murid laki-laki. Kode etik yang dilaksanakan secara aktif dengan menyertakan strategi pencegahan dan menjawab berbagai kondisi dan mendukung murid untuk tetap berada disekolah tetap diperlukan (sekolah menghadapi masalah dengan murid yang bolos sekolah, terutama murid laki-laki).⁵

Kesetaraan Gender dalam Kurikulum

Pendidikan mempunyai peran penting dalam mendukung masyarakat untuk lebih progresif dalam hal gender, di mana laki-laki dan perempuan menjadi mitra sejajar dalam urusan publik maupun rumah tangga. Hasil penelitian baru-baru ini tentang kurikulum dan buku ajar dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas, baik di sekolah maupun madrasah, menunjukkan bahwa perempuan biasanya digambarkan beraktivitas di rumah atau sebagai orang yang mengurus dan mendukung orang lain. Di sisi lain, laki-laki digambarkan sebagai orang yang kuat, tegas dan pintar serta dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Peran gender dalam buku ajar tersebut searah dengan pandangan tradisional di mana laki-laki lebih unggul serta berkedudukan lebih tinggi dan berkuasa. Akibatnya, bahan ajar seperti ini memperkuat stereotip gender. Tinjauan ini juga menemukan bahwa buku ajar yang bias gender digunakan oleh sekolah untuk setiap jenjang pendidikan. Namun demikian, Kemdikbud dan Kemenag telah meriviu buku serta bahan ajar dan menyadari bahwa materi tersebut perlu diperbaiki pada saat tahapan pengembangan kurikulum berikutnya.

Pada tahun 2011, analisis gender dilakukan terhadap buku ajar yang diterbitkan oleh 15 penerbit. Buku ajar yang dianalisis adalah untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama Islam, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial serta Pendidikan Kesegaran Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan. Kelas yang buku ajarnya dianalisis adalah kelas 1, 6, 9 dan 12. Gambar yang menampilkan hanya perempuan mengerjakan tugas rumah tangga ditemukan dalam semua buku. Tingkat stereotip yang paling tinggi ditemukan pada buku kelas 6 dan diikuti oleh buku kelas 1. Dominasi laki-laki dalam ruang publik ditemukan dalam buku untuk semua kelas dengan jumlah gambar yang menunjukkan stereotip terbanyak pada buku untuk kelas 6. "Gambar tentang kepemimpinan sosial dan bidang teknologi didominasi oleh laki-laki. Walaupun sebenarnya di Indonesia banyak perempuan yang menjadi pemimpin, aktivis, politisi, mantan presiden, menteri dan pejabat negara, ilmuwan yang diakui secara internasional serta astronot, perempuan seperti ini kurang dikedepankan dalam buku ajar"⁶. Survei Tinjauan menemukan cerita dan gambar yang digunakan dalam buku ajar Bahasa Inggris lebih baik dari buku ajar bidang lain dalam hal penyampaian kesetaraan gender.

5 Satu sekolah yang dikunjungi melaporkan murid laki-laki mengisi absensi dan kemudian pergi meninggalkan sekolah untuk 'bermain'. Sekolah lainnya melaporkan lebih sedikit murid laki-laki yang mengikuti pelajaran matematika dibanding murid perempuan karena mereka 'tidak suka matematika'.

6 Iwu, D. Utomo & P. McDonald. 2011. *Policy Brief No.1. Gender Depiction in Indonesian Primary and Secondary School Textbooks: The Way Forward. Gender and Reproductive Health Survey*, Australia National University/ADSRI-ANU. Sebagian dana penelitian didukung oleh Bappenas.

Tinjauan ini menemukan bahwa buku yang “sangat menarik untuk dibaca” (*high-interest reading*) dan mencerminkan perbedaan minat antara murid laki-laki dan perempuan, kurang tersedia di perpustakaan sekolah yang dikunjungi. Keadaan perpustakaan lebih buruk di sekolah yang sumber dayanya terbatas, di mana isi perpustakaan sangat sedikit atau bahkan tidak ada buku bacaan sama sekali. Kepala sekolah, petugas perpustakaan dan guru tidak mendapatkan pelatihan yang baik dalam mengembangkan strategi inovatif mendorong murid laki-laki maupun perempuan untuk lebih sering membaca dan meningkatkan keterampilan membaca. Sering kali upaya agar perpustakaan menjadi lebih menarik bagi murid laki-laki maupun perempuan seperti menciptakan “sudut baca” yang dilengkapi kursi yang nyaman, memasang gambar yang berwarna-warni, peta atau hasil karya seni murid di dinding, atau gambar yang berisi informasi menarik tentang tokoh olahraga atau keilmuan (laki-laki maupun perempuan) tidak dilakukan.

Berdasarkan data Susenas tahun 2009, Suharti (2012) menemukan bahwa murid laki-laki lebih sedikit membaca dibanding perempuan. Di antara murid pendidikan sekolah menengah pertama yang disurvei, hanya 17% murid laki-laki membaca buku cerita dibanding 22% perempuan. Persentase murid perempuan yang membaca koran juga dua kali lipat dari persentase murid laki-laki. Hal ini dapat menjelaskan perbedaan prestasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia antara murid laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan Gender dalam Pelatihan dan Pengembangan Guru

Mengingat kegiatan pengarusutamaan gender di dalam Kemdikbud dititikberatkan pada pendidikan non formal, pelatihan tanggap gender bagi manajemen dan guru sekolah formal masih belum mendapatkan perhatian penuh. Namun demikian, belakangan ini semakin banyak kepala sekolah dan guru dari berbagai provinsi yang telah diikutsertakan dalam lokakarya atau seminar guna meningkatkan kesadaran mereka tentang kesetaraan gender. Kegiatan pelatihan tersebut dibiayai oleh Kemdikbud melalui program uji coba dan pelatihan dan kegiatan yang didanai lembaga donor. Penelitian lapangan di Kabupaten Sleman, Klaten dan Kupang menemukan bahwa sejumlah kepala sekolah dan guru telah dilatih dan kemudian mereka menyebarkan isi pelatihan tersebut kepada rekan-rekan di dalam sekolahnya sendiri dan melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kegiatan uji coba kesetaraan gender di sekolah terpilih di Kabupaten Sleman dan Kupang melaporkan dampak positif di tingkat sekolah. Namun demikian, walaupun kegiatan uji coba seperti ini memang sangat diperlukan untuk menemukan model praktik yang baik (*good practice*) untuk dicontoh oleh sekolah lain, namun dampak perluasan contoh-contoh tersebut memerlukan waktu. Strategi tambahan juga masih diperlukan untuk menjangkau lebih banyak guru, dosen dan tenaga manajemen pendidikan. Yang masih diperlukan adalah pelaksanaan program pelatihan cara belajar murid aktif (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau PAKEM) yang tanggap gender.

Beberapa perguruan tinggi sudah mulai menyelenggarakan kegiatan pengarusutamaan gender pada program pendidikan guru. Rektor (perempuan) salah satu perguruan tinggi di Kupang telah mengarusutamakan kesetaraan gender secara aktif di perguruan tingginya. Beliau menceritakan perlunya peningkatan kapasitas bagi para dosen dalam bidang metode belajar mengajar yang inovatif, termasuk metode modern (PAKEM) yang dapat dilaksanakan secara tanggap gender sehingga mempengaruhi perilaku murid. Perguruan tinggi dengan program pendidikan guru merupakan peluang baru (*key entry point*) untuk peningkatan mutu guru yang tanggap gender.

Semua program pelatihan calon kepala sekolah dan kepala sekolah perlu menyertakan pelatihan kesetaraan gender dalam pendidikan. Para kepala sekolah perlu tahu bagaimana mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja belajar murid laki-laki maupun perempuan dalam setiap mata pelajaran. Kepala sekolah juga bisa bekerja sama dengan komite sekolah dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya kehadiran anaknya di sekolah (pada saat penelitian lapangan, beberapa sekolah melaporkan bahwa ketidakhadiran lebih banyak terjadi diantara murid laki-laki). Para kepala sekolah harus mengamati berapa kali guru memberi pekerjaan rumah serta apakah pekerjaan rumah tersebut diperiksa guru dan hasilnya dibicarakan dengan murid. Selain itu, perlu diamati sampai seberapa jauh pekerjaan rumah tersebut dikerjakan oleh murid laki-laki dan murid perempuan. Beberapa sekolah melaporkan bahwa murid perempuan lebih tekun mengerjakan pekerjaan rumah dibandingkan dengan murid laki-laki. Perbedaan ini menjadi lebih bermakna jika mengingat perbedaan kinerja antara murid laki-laki dan perempuan dalam pelajaran tertentu.

Kesetaraan Gender dalam Prestasi Belajar Murid

Di dalam wawancara informal selama Tinjauan ini, murid dan guru SMA baik laki-laki maupun perempuan semuanya mengatakan bahwa murid laki-laki lebih unggul dalam Ilmu Pengetahuan Alam sedangkan murid perempuan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pendapat ini mencerminkan hasil penilaian internasional yang diselenggarakan di Indonesia untuk bidang-bidang tersebut. Masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah pendapat seperti ini bisa menghalangi murid perempuan di SMA/MA untuk meraih sukses di bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan juga murid laki-laki di bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para guru harus dilatih agar mengerti bahwa pendapat dan harapan mereka tentang murid laki-laki dan perempuan bisa mempengaruhi proses evaluasi murid yang mereka lakukan seperti bagaimana caranya menilai kemajuan murid, menilai ulangan, serta memberi umpan balik pada murid. Demikian juga kurikulum dan buku teks yang memperkuat gambaran bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam harus diubah.

Ada perbedaan prestasi belajar dalam mata pelajaran inti antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Dalam satu dasawarsa terakhir, ujian internasional PISA untuk murid berumur 15 tahun sudah dilaksanakan sebanyak empat kali di Indonesia. Setiap kali ujian tersebut dilaksanakan, hasil ujian menunjukkan murid laki-laki nilainya lebih rendah dari perempuan dalam bidang membaca (*literacy*) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris – hal tersebut juga merupakan kecenderungan di seluruh dunia. Hasil survei madrasah QEM⁷ menunjukkan hal yang sama, yaitu murid perempuan mencapai nilai lebih tinggi secara signifikan



7 Kementerian Agama, Februari 2011. Penelitian Mutu Pendidikan di Madrasah (*Quality of Education in Madrassah Study*) Laporan Final.

dalam bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sedangkan murid laki-laki mencapai nilai lebih tinggi dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam. Tidak ada perbedaan dalam Matematika. Selama penelitian untuk Tinjauan ini, baik kepala sekolah maupun guru pada semua SMP dan SMA yang dikunjungi melaporkan bahwa murid perempuan mencapai nilai lebih tinggi dari murid laki-laki dalam bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sedangkan murid laki-laki mencapai nilai lebih tinggi dalam Ilmu Pengetahuan Alam. Para pihak terkait melaporkan bahwa kepala sekolah dan guru belum mengetahui cara mengembangkan strategi untuk mendorong laki-laki dan perempuan yang prestasinya rendah di bidang yang berbeda agar dapat mengurangi “kesenjangan” prestasi tersebut.

Pada saat memilih bidang studi untuk pendidikan menengah atas dan yang lebih tinggi, guru bimbingan dan konseling tidak mendorong murid perempuan untuk memilih bidang dan karir yang dipandang secara tradisional sebagai “milik” laki-laki. Jumlah perempuan yang memilih bidang IPTEK di SMK dan perguruan tinggi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan dan stereotip gender yang terjadi mulai dari pendidikan dasar dan menengah pertama tentang kemampuan perempuan dan laki-laki dalam Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Stereotip gender mendorong perempuan memilih bidang karir dengan gaji/upah lebih rendah, seperti umpamanya di bagian administrasi, PAUD, pendidikan dan kesehatan masyarakat sedangkan laki-laki cenderung memilih bidang sains, teknologi, teknik dan hukum. Hal ini dapat dilihat pada rasio gender murid SMK dan perguruan tinggi di Indonesia.

Kesetaraan hasil di luar bidang pendidikan tercapai apabila laki-laki dan perempuan setara dalam kedudukan, kesempatan memperoleh barang dan sumber daya (*resources*), kesempatan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik serta menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Kesetaraan ini menuntut agar kesempatan karir serta pendapatan laki-laki dan perempuan juga sama bagi mereka yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama. Walaupun dimensi kesetaraan ini berada di luar sistem pendidikan, namun pencapaian kesetaraan pendidikan menjadi pendorong serta memberi sumbangan terhadap pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan lainnya termasuk pasar tenaga kerja dan kehidupan pribadi.

Rekomendasi

1. Menjamin bahwa semua kegiatan pengkajian ulang kurikulum untuk peningkatan mutu direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyertakan bias dan stereotip gender. Buku ajar baru perlu diperiksa/disaring sebelum diterbitkan untuk menjamin bahwa buku tersebut bebas dari bias dan stereotip gender.
2. Melaksanakan program pendidikan guru (*pre-service*) komprehensif yang menyertakan kesetaraan gender di semua perguruan tinggi dan lembaga pendidikan guru maupun tenaga kependidikan. Juga melakukan program pelatihan (*in-service*) komprehensif untuk pengawas, kepala sekolah, dan guru yang terfokus kepada pendekatan tanggap gender dalam manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum, dan proses belajar mengajar yang menggunakan metode modern.
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peralatan dan materi pendukung di perpustakaan (termasuk bahan bacaan yang menarik / *high interest reading material*) serta laboratorium (sains dan komputer) di sekolah untuk mendukung kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar di semua bidang pelajaran.
4. Mendukung rektor semua perguruan tinggi mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh kegiatan termasuk pelatihan kesetaraan gender serta rivi dan memperbaharui semua mata kuliah. Mendukung perguruan tinggi untuk menghasilkan data yang dipilah menurut jenis kelamin tentang mahasiswa maupun dosen untuk setiap mata kuliah (jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan).
5. Menyertakan hal-hal berikut dalam penelitian dan pengembangan kesetaraan gender di masa yang akan datang:
 - Apakah persepsi tentang kelemahan perempuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam menghalangi pencapaian prestasi belajar di sekolah menengah atas? Dan juga hal yang sama terkait persepsi untuk murid laki-laki dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Upaya ini juga termasuk analisis data PISA 2009 untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap dari gender dan golongan sosio-ekonomi yang berbeda. Hal-hal ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi pembaharuan kurikulum mendatang.

- Penelitian tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dari golongan sosio-ekonomi yang berbeda dalam kebiasaan membaca, hal-hal yang dianggap menarik untuk dibaca, keseringan membaca, serta sikap tentang membaca. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam pembaharuan kurikulum membaca dan menulis (*literacy*). Menganalisis data survei PISA 2006 tentang perbedaan sikap terhadap membaca antara laki-laki dan perempuan serta data nasional TIMMS dan PIRLS.
 - Kemdikbud dan Kemenag menyediakan dana untuk membiayai penelitian partisipatif serta studi lacak (*tracer study*) tentang semua indikator partisipasi dan pencapaian hasil. Penelitian tersebut digunakan sebagai masukan dalam penetapan strategi bagi murid laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan, prestasi belajar serta pengembangan karir.
6. Mendorong pemerintah daerah untuk mengeksplorasi kemitraan inovatif dengan sekolah dan LSM serta melatih pengawas dan kepala sekolah untuk mengembangkan strategi untuk:
 - Mengurangi perilaku anti sosial (termasuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak yang timbul dari *bullying* dan pelecehan seksual) dengan bekerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak.
 - mendorong kesadaran gender serta menyebarluaskan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di sekolah pendidikan menengah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.
 7. Untuk kesetaraan hasil dalam hal di luar pendidikan (eksternal), mengkaji ulang kebijakan pasar tenaga kerja dari segi gender terutama proses dan strategi pengembangan karyawan terkait upah/gaji, status/jabatan, tunjangan, kenaikan pangkat dan umur pensiun.

Kesimpulan

Selama beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Indonesia memberi perhatian mendalam dalam hal terkait angka meneruskan sekolah, keberhasilan belajar serta mutu dan relevansi pendidikan untuk semua. Namun demikian, kesetaraan gender dapat dicapai pada saat murid perempuan maupun laki-laki mendapatkan pengalaman yang sama di sekolah dan proses belajar dan mengajar dilakukan secara tanggap gender. Pencapaian kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam proses belajar mengajar serta keberhasilan pelajaran menjadi salah satu tantangan utama bagi Pemerintah Indonesia selama dasawarsa mendatang.

Walaupun Tinjauan ini menyoroti banyak tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan, namun Tinjauan juga menyertakan banyaknya keberhasilan dan praktik yang baik (*good practice*) yang dapat dijadikan landasan bagi perkembangan selanjutnya. Tanggapan positif muncul dari peserta yang berjumlah 270 orang dalam 16 diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan oleh tim Tinjauan di lima Provinsi. Hasil dari diskusi kelompok jelas: Apabila ada pengarah mengenai pengarusutamaan gender dalam pendidikan dari Kemdikbud dan Kemenag dan pengarah tersebut dilengkapi dengan alokasi dana pendukung, maka berbagai lembaga di daerah sudah siap untuk melaksanakannya. Sekolah-sekolah terpilih di beberapa provinsi, kabupaten dan kota sudah mulai memasuki proses tersebut dengan beberapa program uji coba. Kabupaten/kota lain juga melaporkan pengalaman positif dalam hal pengarusutamaan gender dalam pendidikan untuk semua jenjang. Program rintisan tersebut harus terus diperkuat dan dievaluasi sebagai contoh praktik yang baik (*good practice*). Pengetahuan tentang proses belajar mengajar serta alat-alat pendukung yang telah dikembangkan harus disebarluaskan.

Dengan terus meningkatkan komitmen dan kapasitas yang ada, diharapkan upaya dalam mencapai kesetaraan untuk semua dan melalui pendidikan akan menghasilkan lebih banyak kemajuan dalam sepuluh tahun ke depan.

Kredit Foto

Sampul depan	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Halaman 2	Foto Uni Eropa
Halaman 12	Foto Kemdikbud, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Sampul belakang	Dari pojok kiri atas searah jarum jam: Foto dari kioslaris.wordpress.com Foto dari www.123rf.com Foto dari hjf-ringan.blogspot.com Foto dari hjf-ringan.blogspot.com Foto dari budaya-indonesia.org Foto dari toko-berkat.blogspot.com

